



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2025**





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan salah satu upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Bengkulu selama tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yaitu

“TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT KOTA BENGKULU YANG BAHAGIA DAN RELIGIUS”

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun 2024 - 2026. Hasil pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu terkhususnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025

Bengkulu, 2026

Pj Sekretaris Daerah



Medy Pebriansyah



RINGKASAN EKSEKUTIF

Di awal Tahun 2025 telah dilakukan penandatanganan Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang meliputi sasaran, indikator dan target capaian kinerja mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu 2024 - 2026. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan pada akhir tahun anggaran, yaitu dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dari hasil analisis dan evaluasi secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Bengkulu secara keseluruhan tingkat capaian kinerja adalah **baik**, meskipun masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan realisasi capaiannya pada tahun 2026 mendatang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Fungsi dan Tugas	5
1.4 Isu Strategis.....	6
1.5 Keadaan Pegawai.....	9
1.6 Keuangan	10
1.7 Sistematis LKjIP.....	11
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	19
2.4 Perjanjian Kinerja	38
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	40
3.2 Realisasi Anggaran.....	53
BAB IV : PENUTUP	57
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	15
Tabel 2.2	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja	39
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja	41
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 (satu)	43
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (dua)	51
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 (tiga)	52
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Tahun 2025	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Persentase Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Gambar 1.2	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	10



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kota Bengkulu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

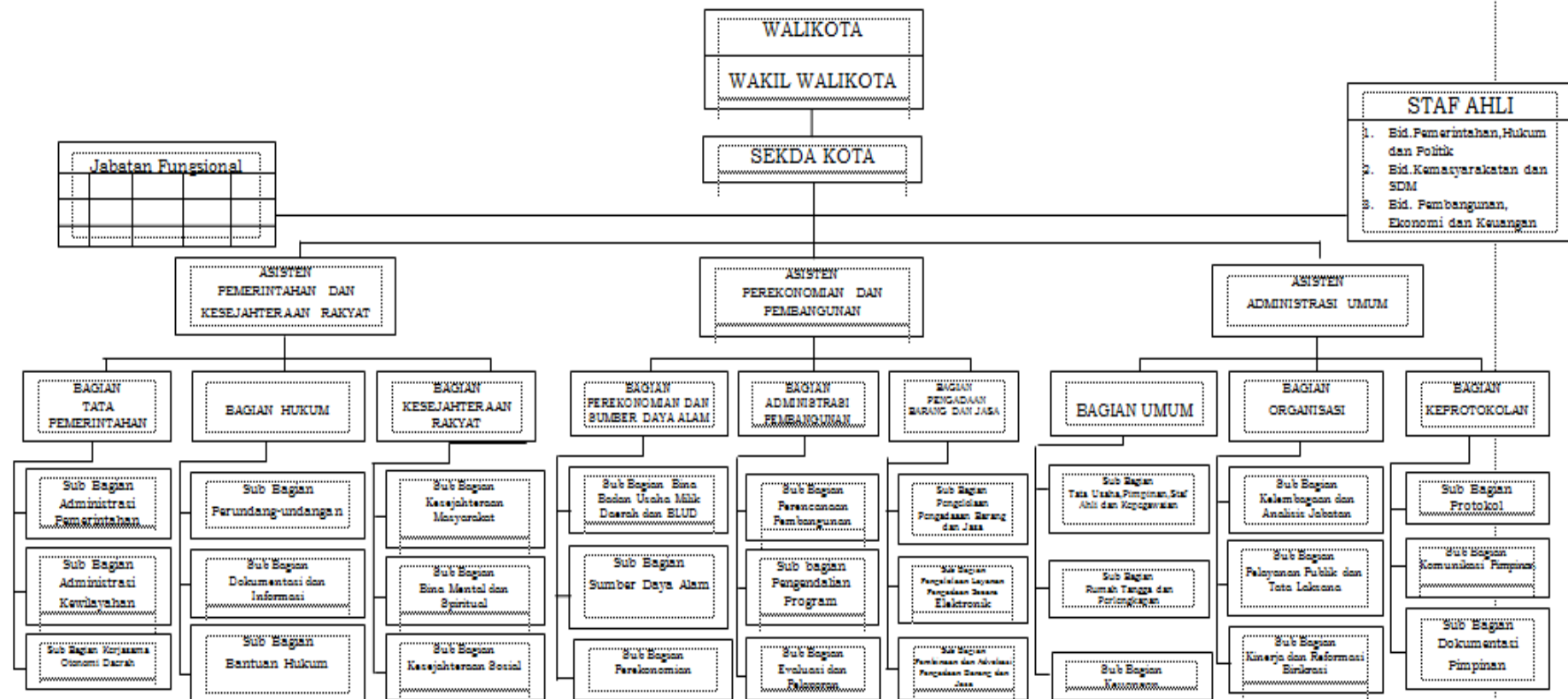
1.1 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu di pimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan, mencakup :
 - a) Sub Bagian Administrasian Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
 - c) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 - 2) Bagian Hukum, mencakup :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi ;
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, mencakup :
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - b) Sub Bagian Mental dan Spiritual;
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi :
 - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mencakup :
 - a) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan BLUD;
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam;
 - c) Sub Bagian Perekonomian.
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan, mencakup :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3) Bagian Pengadaan Barang / Jasa, mencakup :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

- c. Asisten Administrasi Umum, yang membawahi :
- 1) Bagian Umum, mencakup :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Bagian Organisasi, mencakup :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik;
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 3) Bagian Keprotokolan, mencakup :
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU



WALIKOTA BENGKULU,

dto

H. HELMI HASAN

1.2 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu disusun berdasarkan beberapa aturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026.

1.3 Fungsi dan Tugas

Sekretariat Daerah Kota Bengkulu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu yang merupakan tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota

Bengkulu dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu, Sekretariat Daerah Kota Bengkulu mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, dalam menjalankan tugas Sekretariat Daerah Kota Bengkulu mempunyai fungsi dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan organisasi Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Isu Strategis

- 1) Aspek-aspek strategis Sekretariat Daerah Kota Bengkulu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun 2025 sebagai berikut :

a) Aspek Kelembagaan

Sekretariat Daerah sebagai organisasi perangkat daerah yang menjalankan tugas untuk membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, yang diantaranya melaksanakan tugas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan mengoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, dan membina penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Dalam hal ini Sekretariat Daerah selalu memperhatikan isu-isu strategis yang diperoleh langsung oleh Sekretariat Daerah Kota Bengkulu atau dengan cara mengakomodir isu-isu yang berasal dari masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

b) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka ketercukupan dari aspek kuantitas dan kualitas SDM sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, yaitu dari segi jumlah dan kompetensi pegawai yang memahami permasalahan kebijakan dan administrasi penyelenggaraan urusan.

c) Aspek Sarana Prasarana

Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai pejabat eselon tertinggi dengan hampir semua pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bengkulu melalui Sekretaris Daerah, hal ini secara tidak langsung menyebabkan aktivitas pemerintahan yang di lingkungan Sekretariat Daerah relatif lebih banyak dari Perangkat Daerah lainnya. Sekretariat Daerah juga mengurus urusan rumah tangga pimpinan dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota, sehingga kelengkapan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan menjadi sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

2) Permasalahan Utama (*strategic issued*) Organisasi

Permasalahan Utama (*strategic issued*) yang perlu mendapat perhatian khusus pada tahun 2024-2026 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga Perangkat Daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perizinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

2. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik sehingga dapat menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat.

3. Pedayagunaan sumber daya aparatur daerah.

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas.

Disamping permasalahan utama (*strategic issued*) sebagaimana tersebut di atas, isu-isu yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut :

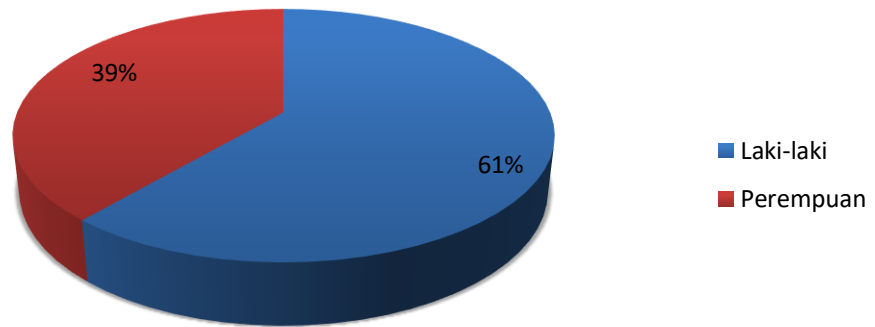
1. Grand Desing Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2016-2019 Pemerintah Kota Bengkulu;
2. Kebutuhan akan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) serta regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif melalui penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Mewujudkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, untuk mendorong terwujudnya prinsip-prinsip *good governance*;
5. Penyusunan sistem dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien;
6. Peningkatan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
7. Peningkatan kualitas terhadap aparatur daerah dalam pengelolaan aparatur daerah.

1.5 Keadaan Pegawai

1. Sumber Daya Manusia (Pegawai Negeri Sipil)

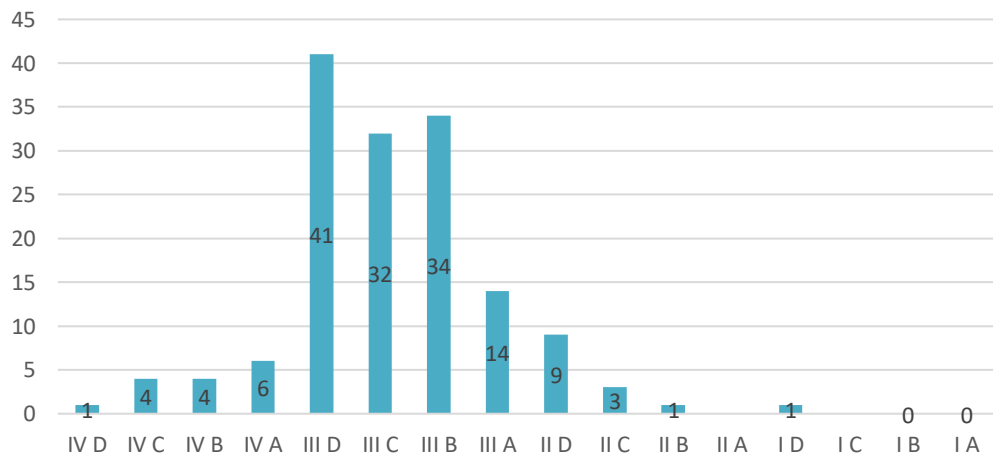
Sekretariat Daerah Kota Bengkulu memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 150 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 1.1
Persentase Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas PNS yang bertugas di Sekretariat Daerah Kota Bengkulu adalah Laki-laki dengan persentase 61% dan Perempuan dengan persentase 39%.

Gambar 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan



Dilihat dari gambar di atas, maka PNS di Sekretariat Daerah Kota Bengkulu mayoritas berada pada Golongan III.D (Penata Muda Tingkat.I) dengan jumlah 41 Orang dari 150 Orang.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kota

Bengkulu pada tahun 2025 berasal dari APBD Kota Bengkulu. Pada Tahun Anggaran 2025 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 67.641.961.638,-** yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Tabel 1.4
Program dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2025

No	Program	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 59.474.636.391
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 5.455.563.221
3.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 2.711.762.026
	Jumlah	Rp. 67.641.961.638

Sumber Data : Bagian Pembangunan Setda

1.7 Sistematis LKjIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Struktur Organisasi
- B. Landasan Hukum
- C. Fungsi dan Tugas
- D. Isu Strategis
- E. Keadaan Pegawai
- F. Keuangan
- G. Sistematika LKjIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- D. Perjanjian Kerja (PK)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target dan Realisasi Tahun 2025
2. Realisasi 2024 dengan realisasi 2025
3. Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bengkulu merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah dimana salah satunya adalah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026, penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dibuat pada masa Kepala Daerah terpilih, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bengkulu telah melalui tahapan yang simultan yang diawali dengan proses penyusunan RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 yang melibatkan *stakeholders* terkait pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Sekretariat Daerah Kota Bengkulu merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan *stakeholders* terkait. Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dimuat program dan

kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai, yang dirumuskan, bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur yaitu sesuatu yang dicapai atau yang dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam periode tertentu. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dalam rangka memecahkan masalah serta isu strategis Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Bengkulu sebagai berikut :

RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH 2024-2026

Tabel T-C.25.
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		
			2024	2025	2026			2024	2025	2026
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3.0	3.1	3.2	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP daerah	12.41	12.91	12.91
							Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	60%	65%	75%
							Persentase rancangan perda dan perkara yang diharmonisasi	65%	68%	70%
							Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	100%	100%	100%

RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH 2024-2026

							Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	B	B	B
							Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
							Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	75%	80%	85%

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. Dalam hal ini, indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan. Harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan organisasi sebagai dasar penilaian kinerja. IKU Sekretariat Daerah Kota Bengkulu telah ditetapkan mengacu dengan Renstra, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)			
		Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP daerah	Nilai Kemenpan RB	Kemenpan RB	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
			Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Dibagi Jumlah Perikatan Kerjasama Dikali 100%	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
			Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	Jumlah Rancangan Perda Menjadi Perda Dibagi Jumlah Rancangan Perda Yang Diajukan Untuk Ditetapkan Sebagai Perda X 100%	Bagian Hukum	Bagian Hukum
			Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	Jumlah Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian Ikk LPPD Secara Tepat Waktu Dibagi Jumlah Perangkat Daerah X 100	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
			Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	Jumlah Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai Ikm Minimal B Dibagi Jumlah Perangkat Daerah Yang Dinilai X 100%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Bagian Organisasi dan Tata Laksana

			Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	Jumlah Kebijakan Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Kebijakan Yang Dihasilkan Per Tahun X 100%	Bagian Kesra, Bagian Perekonomian	Bagian Kesra, Bagian Perekonomian
			Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	Jumlah Tingkat Capaian Seluruh Program Setda Dibagi Jumlah Program Setda	Bagian Pembangunan, Bagian Umum, Bagian Keprotokolan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pembangunan, Bagian Umum, Bagian Keprotokolan, Bagian Pengadaan barang dan Jasa
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi			
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	Dokumen RR pada Perangkat Daerah	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	LHE Inspektorat	Bagian Organisasi dan Tata	Bagian Organisasi dan Tata Laksana

					Laksana	
		Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam Satu Tahun	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Sekretariat Daerah Kota Bengkulu telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025, akan tetapi dengan adanya Refocusin dan juga Anggaran Perubahan serta terkait dengan penangguhan SPD maka banyak kegiatan tahun 2025 tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tidak ada anggaran. Berikut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu :

Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP daerah	12,91	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel	95	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	101.576.700	40.654.770
		Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	B		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan analisis jabatan	1 Dokumen	207.382.200	46.582.173

					Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	100		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	4 Laporan	95.150.800,00	91.394.650
		Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	80				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	20.753.258,00	6.316.075
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	49.931.667,00	6.738.852

							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triulan/semesteran SKPD	4 laporan	149.795.100,00	110.000.300
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	180 orang/bulan	##### ####	##### #####
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 dokumen	873.753.300,00	873.753.300

								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	250 dokumen/9 bagian	93.239.000,00	68.231.400
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	108.470.600,00	48.470.600
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	303.000.000,00	92.200.000

								Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3 dokumen	189.898.800,00	87.950.000
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	198.547.000,00	78.547.000
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9 paket	534.961.400,00	280.012.900
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	600.000.000,00	500.000.000

								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	16 paket	292.369.000,00	145.687.00 0
								Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.474.140.000,0 0	759.342.00 0
								Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggar aan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	600 laporan	4.058.000.000,0 0	1.922.000. 000
								Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	116.400.000,00	66.000.000
							Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik	12 laporan	1.611.997.997,0 0	1.413.133. 314

								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	1 laporan	149.290.300,00	78.850.000
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	6.276.054.659,0 0	5.211.054. 659
							Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kenda raan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	31 unit	1.719.745.000,0 0	948.144.20 0

								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	85 unit	1.576.950.000,00	799.755.000
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	4 unit	250.000.000,00	250.000.000
							Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan KDH/WKDH	2 orang/bulan	784.033.000,00	784.033.000

								Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH	Jumlah paket pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH yang disediakan	12 Paket	836.400.000,00	836.400.000
								Pelaksanaan Medical Check Up KDH dan WKDH	Jumlah orang yang menerima medical check up KDH dan WKDH	8 Orang	50.000.000	50.000.000
							Fasilitasi Kerumaht anggaan Sekretaria t Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga KDH yang disediakan	12Paket	6.388.727.800,00	4.197.228.000
								Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga WKDH yang disediakan	11 Paket	3.205.270.000,00	2.424.070.000

								Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	5 Paket	3.796.730.000,00	2.199.864.930
							Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	1.017.830.000,00	432.428.235
								Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	222.200.000,00	119.121.900
								Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	184.092.700,00	109.191.000

		Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian Ikk LPPD Secara Tepat Waktu	100	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 Dalam Rangka Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	95	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	125.842.970,00	52.981.442
								Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	379.629.811,00	281.742.535
								Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	387.160.000,00	155.143.235
		Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	65				Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	706.628.419,00	262.204.550

								Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	19.998.000,00	8.110.000
		Persentase Rancangan Perda Dan Perkada Yang Diharmonisasi	100		Persentase Rancangan Perda Yang Diharmonisasi	68	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang disusun	85 Dokumen	312.706.104,00	162.112.578
								Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	59 Kasus	1.329.314.000,00	##### #####
								Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	445 Dokumen	279.249.583,00	102.590.087

		Persentase Kebijakan yang Ditindaklanjuti	100		Persentase Kebijakan Dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	100	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan KB	2 Dokumen	64.437.915,00	35.799.880
--	--	---	-----	--	--	-----	--	---	---	-----------	---------------	------------

								Fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Laporan	1.747.342.814,0 0	1.644.576. 713
								Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata pendidikan, Kebudayaan Perpustakaan, Kearsipan Tanstibun Linmas	2 Dokumen	103.253.605,00	90.840.529

		Persentase Kebijakan yang Ditindaklanjuti	100	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian Daerah Yang Ditindak Lanjuti	100	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen BLUD	83.325.000,00	49.197.400
								Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan 4 kali	83.324.645,00	39.209.800

							Pemantau an Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan , Perindustria n, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	18.025.975,00	10.235.421
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	-----------	---------------	------------

								Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	1 Dokumen	15.304.025,00	8.439.994
							Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	506.165.588,00	298.376.036

								Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi yang disusun	2 Laporan	31.903.782,00	7.285.105
		Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	80		Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan Dengan Metode Tender	52	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	85 paket	856.613.011,00	380.083.957
								Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	2 dokumen	345.000.000,00	194.516.500
								Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	45 orang	772.100.000,00	254.752.620
											67.641.961.638	52.263.364.000

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Sekretariat Daerah Kota Bengkulu telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP Daerah	12,91
		2. Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	65
		3. Persentase Rancangan Perda	68

		Dan Perkada Yang Diharmonisasi	
		4. Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian Ikk LPPD Secara Tepat Waktu	100
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	100
		6. Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	100
		7. Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	80
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	8. Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	1
		9. Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB
3	Melaksanakan Inovasi Daerah	10. Jumlah Inovasi dalam Satu Tahun	2



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2025, yang memuat realisasi kinerja dan capaian atas target kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi pencapaiannya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu adalah Baik dengan rincian capaian target kinerja sebagai berikut :

3.1.1 Target dan Realisasi Tahun 2025

Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP Daerah	12,91	9,01	
		2. Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	65	27	41,53
		3. Persentase Rancangan Perda Dan Perkada Yang Diharmonisasi	68	36	52,94

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)
		4. Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian Ikk LPPD Secara Tepat Waktu	100	100	100
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	100	100	100
		6. Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	100	100	100
		7. Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	80	88	110
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	8. Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	1	1	100
		9. Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	Belum rilis	
3	Melaksanakan Inovasi Daerah	10. Jumlah Inovasi dalam Satu Tahun	2	2	100

Sumber data : Kemetrierian PANRB, Kementrian Dalam Negeri, Bagian Setda

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu setiap indikator dijelaskan secara berurutan sesuai dengan misi. Sebagai berikut:

1 Meningkatkan Kualitas kinerja Penyelenggara Pemerintah

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 (satu)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi		Capaian Kinerja (%)
				2024	2025	
1	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP Daerah	12,91	8,86	9,01	
		2. Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	65	60	27	41,53
		3. Persentase Rancangan Perda Dan Perkada Yang Diharmonisasi	68	100	36	52,94
		4. Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian Ikk LPPD Secara Tepat Waktu	100	100	100	100

		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	100	100	100	100
		6. Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
		7. Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	80	71	88	110

Sumber data : Kemeriterian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Bagian Setda

➤ **Nilai Komponen Pelaporan pada SAKIP Daerah**

Nilai Komponen Pelaporan Pada Sakip Daerah untuk tahun 2025 ini adalah 9,01% dari Target yang ditetapkan 12,91%. hasil ini berdasarkan rilis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Termasuk bagian dalam Tim SAKIP, Sekretariat Daerah Menjalankan program Peningkatan dan pengawasan akuntabilitas kinerja, Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan, dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk tahun 2024 nilai capaian ini adalah 8,86% sedangkan untuk tahun 2025 mengalami kenaikan dikit yaitu 9,01% dari target yang ditetapkan sebesar 12,91%. Tidak tercapainya sasaran Ini disebabkan Laporan Kinerja pada sebagian PD belum memberikan analisis yang memadai atas faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja.

➤ **Presentase Perikatan Kerjasama yang ditindak lanjuti**

Indikator Presentase Perikatan Kerjasama yang ditidak lanjuti, untuk di tahun 2025 . Dari 22 Kerjasama hanya 6 yang ditindak lanjuti pada tahun 2025 Adapun rinciannya sebagai berikut :

DAFTAR KERJASAMA TAHUN 2025

1. Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan. Dan Pengembangan Potensi Daerah
2. Kerjasama Penggunaan Layanan Perbankan Elektronik dan Digital Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
3. Kerjasama Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik Pemerintah Kota Bengkulu
4. Kerjasama Urusan Pemerintah dengan Tridharma Perguruan Tinggi
5. Sinergi Program Pemerintah Kota Bengkulu dalam Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
6. Kerjasama di Bidang Pertahanan

➤ **Persentase Rencana Perda dan Perkada yang diharmonisasi**

Untuk Indikator Perda dan Perkada yang diharmonisasi, di Tahun 2025 untuk capaian ini tercapai 36 dari target yang ditetapkan sebesar 68 pada Dokumen Perjanjiaan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025. Adapun rinciannya sebagai berikut :

DAFTAR PERKADA KOTA BENGKULU YANG DIHARMONISASI PADA TAHUN 2025

NO URUT	NOMOR PERATURAN	TENTANG	PEMRA KARSA
1	1 TAHUN 2025	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BENGKULU NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA BENGKULU	DPRD
2	2 TAHUN 2025	RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI DAN TSUNAMI	BPBD
3	3 TAHUN 2024	POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	KESEHATAN
4	4 TAHUN 2025	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU	BKPSDM
5	5 TAHUN 2025	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGABELAS YANG	BKPSDM

		BERSUMBER DARI APBD TAHUN 2025	
6	6 TAHUN 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BENGKULU NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
7	7 TAHUN 2025	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKANTORAN RATU AGUNG SINGARAN PATI TAHUN 2024-2044	PUPR
8	8 TAHUN 2025	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU	BAGIAN ORTALA
9	9 TAHUN 2025	SISTEM KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI	BAGIAN ORTALA
10	10 TAHUN 2025	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU	BAPENDA
11	12 TAHUN 2025	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2026	BAPPEDA
12	13 TAHUN 2025	PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU	BAGIAN ORTALA
13	14 TAHUN 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BENGKULU NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG Pensiun di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	BKPSDM
14	15 TAHUN 2025	PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI	BKPSDM
15	16 TAHUN 2025	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD
16	17 TAHUN 2025	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	BAPPEDA
17	18 TAHUN 2025	ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH	BAGIAN EKONOMI
18	19 TAHUN 2025	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025-2029	BAPPEDA
19	20 TAHUN 2025	PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	BAPENDA
29	21 TAHUN 2025	DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	BKPSDM
21	22 TAHUN 2025	TATA CARA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL	BKPSDM
22	23 TAHUN 2025	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN	BPKAD

		SERTA MONITORING DAN EVALUAS BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU	
23	24 TAHUN 2025	STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
24	25 TAHUN 2025	PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA BENGKULU NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS SURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU	BAGIAN ORTALA
25	26 TAHUN 2025	TATA CARA PEMENUHAN KEGUTUHAN PEGAWAI ASN SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF JALUR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PPPK	BKPSDM
26	27 TAHUN 2025	PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU	BPKAD
27	28 TAHUN 2025	PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA BENGKULU NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA BAGI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU	BAGIAN ORTALA
26	29 TAHUN 2025	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
29	30 TAHUN 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BENGKULU NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA	BPKAD
30	31 TAHUN 2025	PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	BKPSDM
31	32 TAHUN 2025	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2026	BPKAD

**DAFTAR PERDA KOTA BENGKULU YANG DIHARMONISASI PADA
TAHUN 2025**

NO URUT	NOMOR PERATURAN	TENTANG	PEMRAKARSA
1	1 TAHUN 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA BENGKULU	BPKAD
2	3 TAHUN 2025	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025-2029	BAPPEDA

NO URUT	NOMOR PERATURAN	TENTANG	PEMRAKARSA
3	4 TAHUN 2025	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2024	BPKAD
4	5 TAHUN 2025	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025	BPKAD
5	6 TAHUN 2025	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	BPKAD

➤ **Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan IKK LPPD Tepat Waktu**

Untuk Indikator ini dari 39 Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu hanya 27 Perangkat Daerah yang menjadi pengampu dalam pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bahan penyusunan LPPD Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2025. Perangkat Daerah yang menjadi pengampu indikator IKK tersebut semuanya telah melaporkan capaian IKK tepat waktu ke Bagian Pemerintahan Setda. Adapun daftar Perangkat Daerah tersebut sebagai berikut :

- 1 BKPSDM
- 2 BPKAD
- 3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- 4 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
- 5 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- 6 DINAS KOPERASI DAN UKM
- 7 DINAS KETAHANANAN PANGAN DAN PERTANIAN
- 8 DINAS PARIWISATA
- 9 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- 10 DINAS PERIKANAN
- 11 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

- 12 DINAS KESEHATAN
- 13 DINAS SOSIAL
- 14 DINAS PERHUBUNGAN
- 15 DINAS KETENAGAKERJAAN
- 16 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
- 17 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- 18 DP3AP2KB
- 19 DPMPTSP
- 20 DINAS PUPR
- 21 BPBD
- 22 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
- 23 SATPOL PP
- 24 BAPPEDA
- 25 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
- 26 BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA
- 27 INSPEKTORAT

➤ **Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai IKM Minimal B**

Sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan surat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 000.8.3.4/358/B.VIII perihal penyampaian pelaporan SKM oleh 10 (sepuluh) Perangkat Daerah Sample kepada Bagian Organisasi Setda Kota Bengkulu. Selanjutnya, Bagian Organisasi melakukan pendampingan kepada beberapa Perangkat Daerah khususnya yang belum pernah melaksanakan SKM, serta mengingatkan Perangkat Daerah terkait batas waktu pelaporan SKM. Selain itu, beberapa Perangkat Daerah juga telah mengikuti pembinaan dari Kemenpanrb terkait kebijakan SKM yaitu Bimbingan Teknis dan Survei serentak. Ada beberapa Perangkat Daerah yang telah mengikuti kegiatan dimaksud adalah Dindukcapil, DPMPTSP, dan RSHD juga termasuk peserta dalam kegiatan pembinaan dari Kemenpanrb.

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah

dilakukan, sebanyak 10 (sepuluh) Perangkat Daerah sample telah menyampaikan laporannya. Ke sepuluh Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. DMPTSP
2. Dukcapil
3. Dinsos
4. Diknas
5. Dinkes
6. Puskesmas Kandang
7. Puskesmas Beringin Raya
8. RSHD
9. PKM Lingkar Timur
10. PKM Jembatan Kecil

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kota Bengkulu, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu **86,84**. Nilai IKM di lingkup Pemerintah Kota Bengkulu menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari tahun 2024 hingga 2025.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 10 (sepuluh) PD telah menyampaikan laporannya.
3. Dari seluruh Perangkat Daerah yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

➤ **Persentase Kebijakan yang di Tindak Lanjuti**

Indikator Kebijakan yang tidak lanjut adalah

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Gerakan Peduli Yatim (GPY).

Tujuan dari Kebijakan GPY adalah :

1. Meningkatkan kepedulian Apratur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat terhadap anak yatim membantu meringankan beban kehidupan anak yatim yang kurang mampu.
2. Memotivasi anak yatim dalam menjalankan kehidupan sehingga mendapat kasih sayang dan kebahagiaan.
3. Menerapkan infaq dan shodaqah dikalangan ASN dan Masyarakat Kota.

Sasaran GPY adalah semua anak yatim yang kurang mampu membiayai pendidikannya di Kota Bengkulu pada semua jenjang pendidikan.

- b. Draf Peraturan Wali Kota Tentang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disusun oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Bengkulu

➤ **Rata-rata Capaian Program Sekretariat Daerah**

Realisasi untuk indikator Rata-rata capaian program sekretariat daerah adalah 88% dari target yang ditetapkan di Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2025 sebesar 80% dengan capaian 110%. Untuk Tahun 2025 Capaian Sasaran Rata-rata Capaian Program Sekretariat Daerah telah melebihi target yang telah ditetapkan.

2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (tiga)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi		Capaian Kinerja (%)
				2024	2025	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	1	1	1	100
		2. Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	B	Blm rilis	-

Sumber data : Bagian Pembangunan dan Bagian Organisasi

➤ **Jumlah Dokumen RR Pada Perangkat Daerah**

Realisasi Capaian jumlah dokumen RR pada Perangkat Daerah untuk tahun 2025 ini telah terealisasi 1 dokumen dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 1 Dokumen dengan capaian 100%.

➤ **Nilai Akip Perangkat Daerah**

Nilai SAKIP Sekretariat Daerah untuk tahun 2024 adalah **69,95** dengan Predikat **B** atas hasil dari laporan kompilasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Bengkulu. Untuk tahun 2025 sampai saat ini LHE internal belum dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Bengkulu. Terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindak lanjuti untuk dapat meningkatkan nilai Sakip di tahun-tahun mendatang sebagai berikut :

- Terkait Perencanaan Kinerja agar Perangkat Daerah Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian renstra, sehingga mengetahui capaian kinerja program dan kegiatan apakah terdapat dampak yang signifikan terhadap isu strategis PD

3 Melaksanakan Inovasi Daerah

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 (tiga)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi		Capaian Kinerja (%)
				2024	2025	
1	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 (satu) Tahun	2	2	2	100

Sumber data : Bagian – bagian Setda

Capaian indikator Jumlah Inovasi dalam 1 (satu) Tahun dengan sasaran strategis Melaksanakan Inovasi Daerah. Untuk tahun 2024 untuk indikator ini telah mencapai target yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah kota Bengkulu Tahun 2024. sedangkan untuk Tahun 2025 Sasaran Strategis Melaksanakan Inovasi Daerah dengan indikator kinerja jumlah Inovasi dalam 1 (satu) tahun juga telah mencapai target yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 dengan Target 2 Inovasi. Untuk tahun 2025 ini capaian kinerja untuk target ini tercapai 100% karena Sekretariat Daerah telah memiliki 2 inovasi yaitu sebagai berikut :

- CEKER (Cek kinerja realisasi SAKIP) penanggung jawab Bagian Organisasi Setda Kota Bengkulu
- POKAD (PojoK Advokasi) penanggung jawab Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu pada tahun anggaran 2025 didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bengkulu. Pada awal Tahun 2025 ditetapkan anggaran sebesar **Rp. 67.641.961.638,-**. Tetapi pada APBD Perubahan ada pengurangan anggaran sebesar **Rp. 6.834.519.421** menjadi **Rp. 60.807.441.217,-** dengan realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar **Rp. 53.275.609.325,-** atau sebesar **87,61%**, dengan rincian sebagai berikut :

3.2.1 Realisasi Anggaran.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		59.474.636.391	54.666.679.585	50.247.744.777
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.753.258	6.316.075	5.846.425
		2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.931.667	6.738.852	5.390.050
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.937.946.110	21.480.778.070	19.380.831.116
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	873.753.300	911.670.000	846.280.000
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.239.000	68.231.400	66.784.100
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	108.470.600	48.470.600	29.862.400
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	149.795.100	110.000.300	79.782.098
	3	Administrasi Kepegawaian			

		Perangkat Daerah				
		8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	303.000.000	137.575.000	113.500.000
		9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	189.898.800	87.950.000	87.560.000
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	198.547.000	198.547.000	186.785.525
		11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	534.961.400	280.012.900	276.974.500
		12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	600.000.000	600.000.000	574.146.000
		13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	292.369.000	145.687.000	143.766.500
		14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.474.140.000	1.399.780.000	1.190.593.994
		15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.058.000.000	2.628.180.000	2.539.379.935
		16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	116.400.000	66.000.000	65.652.000
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.611.997.997	1.206.532.400	1.049.200.402
		18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.290.300	78.850.000	48.815.000
		19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.276.054.659	3.802.862.000	3.777.007.450
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.719.745.000	1.483.690.000	1.416.370.100
		21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.576.950.000	1.223.900.000	1.217.208.021
		22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	250.000.000	249.423.500
	7	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
		23	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	784.033.000	784.033.000	715.035.498
		24	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil	836.400.000	695.000.000	680.400.000

			Kepala Daerah			
		25	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000	50.000.000	22.743.152
	8	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				
		26	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	6.388.727.800	9.444.580.430	8.679.630.425
		27	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3.205.270.000	3.250.980.600	2.875.845.250
		28	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3.796.730.000	3.380.941.230	3.102.248.600
	9	Penataan Organisasi				
		29	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	207.382.200	91.394.650	87.913.875
		30	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	95.150.800	46.582.173	46.489.240
		31	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	101.576.700	40.654.770	37.675.440
	10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
		32	Fasilitasi Keprotokolan	1.017.830.000	432.428.235	421.094.481
		33	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	222.200.000	119.121.900	119.061.700
		34	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	184.092.700	109.191.000	108.448.000
2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		5.455.563.221	4.231.165.799	2.191.685.022
	11	Administrasi Tata Pemerintahan				
		35	Penataan Administrasi Pemerintahan	125.842.970	52.981.442	4.282.900
		36	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	379.629.811	281.742.535	18.752.602
		37	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	387.160.000	155.143.235	95.067.449
	12	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
		38	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.747.342.814	1.608.919.113	266.040.544
		39	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	64.437.915	44.625.480	1.230.580
		40	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	103.253.605	117.672.529	28.522.600
	13	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				
		41	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	312.706.104	162.112.578	131.265.218
		42	Fasilitasi Bantuan Hukum		1.435.064.250	1.348.396.250

				1.329.314.000		
		43	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	279.249.583	102.590.087	82.062.770
	14	Fasilitasi Kerja Sama Daerah				
		44	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	706.628.419	262.204.550	216.064.109
		45	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	19.998.000	8.110.000	0
3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		2.711.762.026	1.909.596.833	836.179.526
	15	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				
		46	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	83.325.000	49.197.400	15.744.470
		47	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	83.324.645	39.209.800	12.016.791
	16	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				
		48	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	31.903.782	7.285.105	6.592.300
		49	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	506.165.588	298.376.036	235.028.603
	17	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
		50	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	856.613.011	1.047.583.957	329.814.464
		51	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	345.000.000	194.516.500	115.254.055
		52	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	772.100.000	254.752.620	106.611.769
	18	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				
		53	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	18.025.975	10.235.421	8.265.536
		54	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	15.304.025	8.439.994	6.851.538
			Jumlah	67.641.961.638	60.807.442.217	53.275.609.325

Sumber Data : Bagian Pembangunan Setda



BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tergolong baik, walaupun tidak semua target yang telah ditetapkan di dalam Perjajian Kinerja dapat tercapai 100%. Kedepannya akan dilakukan perbaikan-perbaikan agar penetapan kinerja dapat lebih terukur lagi dan optimalisasi sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan review terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, agar capaian yang telah dihasilkan pada tahun 2025 dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya.
2. Melakukan review terhadap beberapa indikator kinerja yang sulit diukur.
3. Meningkatkan kinerja Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bengkulu.
4. Akan mendorong agar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk dapat segera menyampaikan/mengajukan permohonan lelang barang / jasa secara elektronik melalui e-lelang / e-seleksi kepada Bagian Pengadaan Barang / Jasa setelah Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa (RUP) diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
5. Melakukan koordinasi lebih lanjut (lebih intensif) dengan *stakeholders* terkait, terkhususnya internal Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian upaya yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bengkulu guna tercapainya keberhasilan dalam peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.

Bengkulu,

2026

Pj Sekretaris Daerah

Medy Pebriansyah



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Supratman Kel. Bentiring Permai Telp. (0736) 21415 – 21795 - 20105 – Fax. 5611561

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF GUNADI

Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDY WAHYUDI

Jabatan : Wali kota Bengkulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Bengkulu


DEDY WAHYUDI,

Pihak Pertama,
Sekretaris Daerah


ARIF GUNADI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP Daerah	12,91
		2. Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	65
		3. Persentase Rancangan Perda Dan Perkada Yang Diharmonisasi	68
		4. Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian Ikk LPPD Secara Tepat Waktu	100
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	100
		6. Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	100

		7. Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	80
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	8. Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	1
		9. Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB
3	Melaksanakan Inovasi Daerah	10. Jumlah Inovasi dalam Satu Tahun	2

Sumber : Renstra Setda 2024-2026

ANGGARAN 2025

No	Program	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 59.474.636.391
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 5.435.565.221
3.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 2.711.762.026
	Jumlah	Rp. 67.621.963.638

Sumber Data : Bagian Pembangunan Setda

Bengkulu, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Bengkulu


DEDY WAHYUDI,

Pihak Pertama,
Sekretaris Daerah


ARIF GUNADI

